

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2013-2014**

**Oleh : Bukhori**

Email : bukhoridawis@yahoo.com

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstrak**

Pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang ada di Desa Kecamatan Bandar Petalangan belum berjalan secara maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya Bagaimanakah peran camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014 dan mengetahui hambatan peran camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kuantitatif. Untuk sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Analisa secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan Camat dalam membina kepala Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan, pemberian pelatihan dan supervisi adalah termasuk kategori kurang berperan. Hambatan peran Camat dalam membina tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yaitu: kurangnya perencanaan dan pengalaman Camat Bandar Petalangan dalam memberikan pembinaan terhadap tertib administrasi Pemerintahan Desa. Selain itu yang menjadi hambatan camat terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yaitu rendahnya pendidikan dan pemikiran Pemerintahan Desa dalam mengelola dan mengurus desanya. Pemerintahan Kecamatan kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa. Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan tertib administrasi Pemerintahan Desa.

*Kata Kunci : Peran Camat, Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa*

**ROLE IN THE PROMOTION OF CONDUCT CAMAT VILLAGE GOVERNMENT  
ADMINISTRATIVE DISTRICT BANDAR  
PETALANGAN PELALAWAN YEAR 2013-2014**

Bukhori

Email : bukhoridawis@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*Fostering the orderly administration of the Village Administration in the Village District of Bandar Petalangan has not run optimally. Problems in research formulated the problem How camat role in fostering the orderly administration of the Village Administration in the District Bandar Petalangan Pelalawan Year 2013-2014? The purpose of this study was to determine the role in the formation of orderly administration camat Village Governance in the District Bandar Petalangan Pelalawan Year 2013-2014 and know the resistance camat role in fostering the orderly administration of the Village Administration in the District Bandar Petalangan Pelalawan Year 2013-2014. This study used a descriptive approach quantitative methods. For sample use sampling techniques purposive. Data collection techniques used were questionnaires, interviews and documentation. Quantitative analysis along with the data quality of a percentage (%).*

*The results of this study can be concluded that the role of Head in fostering a village chief in the district of Bandar Petalangan Pelalawan in the provision of guidance, mentoring, providing referrals, provision of training and supervision are less instrumental category. Barriers role in fostering the orderly administration Head of the Village Administration in the District Bandar Petalangan Pelalawan namely: lack of planning and experience Head Bandar Petalangan in providing guidance to the orderly administration of the Village Administration. Besides that become barriers camat the Village Governance in the District Bandar Petalangan Pelalawan low level of education and thinking Village Government in managing and taking care of his village. Government District of less aware of its responsibility as the supervisor of the implementation of the orderly administration of the village administration. Limited facilities and infrastructure used to support the management of the orderly administration of the village administration.*

*Keywords: Role Head, Rural Development Administration Conduct*

## A. PENDAHULUAN

Pentingnya pembinaan camat terhadap kepala desa dan perangkat desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa desa, memimpin, menyusun, menetapkan, membina dan meningkatkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Camat sebagai pembina pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa dituntut untuk dapat membina pemerintah desa dalam mewujudkan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa yang efektif.

Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu (Thoha, 2003 : 182). Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Saydam, 2000 : 7).

Pembinaan dilakukan agar semua kinerja dapat mencapai apa yang di cita-citakan organisasi maupun individu. Nurcholis (2011 : 155) menjelaskan pembinaan Camat sebagai tangan panjang Bupati/Wali Kota kepada desa meliputi: (1) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. (2) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. (3) Memfasilitasi keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. (4) Memfasilitasi urusan otonomi daerah kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa. (5) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. (6) Memfasilitasi tugas

pelaksanaan kepala desa dan perangkat desa. (7) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. (8) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban di lembaga kemasyarakatan. (9) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif. (10) Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. (11) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. (12) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga. (13) Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan. (14) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka tertib administrasi Pemerintah Desa desa dan kelurahan untuk mencapai tujuannya dengan administrasi yang baik pemerintah desa di harapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi terwujudnya demokrasi secara nyata guna peningkatan taraf hidup masyarakat. (Wijaya, 2001:89) .

Berikut ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Desa Kecamatan Bandar Petalang:

Tabel I.2 Inventaris Administrasi Kantor Desa di Kecamatan Bandar Petalang

No	Jenis	Unit	Kondisi
1.	Komputer	3	Rusak
2.	Printer	4	Rusak
3.	Kursi Tamu	11	Baik
4.	Lemari Arsip	11	Baik
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	1	Rusak
6.	Papan Informasi	11	Baik
7.	Meja/Kursi	11	Baik
Jumlah		52	

Sumber: Data Olah Lapangan Tahun 2016

Dari fasilitas sarana dan prasarana seperti tersebut di atas penulis berasumsi, sulitlah diharapkan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik disamping itu untuk kelancaran fungsi administrasi di desa harus didukung oleh pelaksana yang handal dan aparatur yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya dan juga Perangkat Desa Kecamatan Bandar Petalang yang penulis gambarkan hanya berpendidikan rata-rata Sekolah Dasar (SD).

Mengenai kondisi umum terhadap tugas camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pada pembinaan tertib administrasi pemerintah desa di Kecamatan Bandar Petalangan masih terdapat kelemahan dan kekurangan, dimana pemerintah desa belum menguasai dalam hal tertib administrasi Pemerintah Desa. Mengacu pada uraian di atas di temui beberapa fenomena di lapangan sebagai bukti bahwa pembinaan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa belum terlaksana secara maksimal oleh Camat Bandar Petalangan hal ini tandai oleh beberapa fenomena berikut ini:

1. Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kurang disiplin kepala desa dalam melaksanakan tugas.
3. Kurang rasa tanggung jawab kepala desa terhadap tugas yang dilaksanakannya.
4. Minimnya sumber daya aparatur pemerintahan desa

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang peran camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014, maka penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini. "Bagaimanakah peran camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014?"

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan antara pusat dan daerah, antar lembaga, serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Pendapat bahwa pemerintahan merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi, administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat keputusan yang berpengaruh, atau

kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa. Pandangan yang demikian menekankan cara yang digunakan dalam penerapan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktik, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dan yang diperintah (rakyat) (Hamidi, 2010 : 134).

Adapun fungsi pemerintahan, menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha (2003 : 58) menjelaskan ada 3 fungsi hakiki pemerintahan, yaitu;

- a. Pelayanan (*Service*)
- b. Pemberdayaan (*Empowerment*)
- c. Pembangunan (*Depeloment*)

## 2. Administrasi Desa

Administrasi Pemerintahan adalah semua tindakan hukum dan tindakan materil yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pejabat administrasi pemerintahan serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk pelayanan publik terhadap masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Ndraha 2003:590).

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai tertib administrasi Pemerintah Desaan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berdasar kepada diundangkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tertib administrasi Pemerintah Desaan Daerah, dan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 2006.

## 4. Peranan

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Definisi peranan yang dikemukakan oleh Giroth dalam Rauf (2005 : 16) mengemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*).

Giroth dalam Rauf (2005 : 16) menjelaskan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu daripada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas masuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab(*responsibility*) dan otoritas(*authority*).

## 5. Pembinaan

Poerwadarmita (2006: 35) mengatakan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Thoha (2003 : 182) mengatakan pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Thoha (2006:4) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha, yaitu: pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu enunjukkan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Proses penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang di ambil dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi. Dalam mengumpulkan data penelitian teknik yang digunakan yaitu kuisisioner, observasi, dan wawancara. Analisa secara kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%).

### **D. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014**

##### **a. Pemberian Pedoman**

Berdasarkan tabel III.1 dilihat indikator pemberian pedoman kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan oleh Camat, ada 3 orang atau 15,2% jawaban responden penelitian pada kategori berperan, karena responden mengatakan pembinaan camat terhadap Pemerintahan Desa maksimal, selain itu Pemerintahan Desa sudah memahami dan mengerti akan tugasnya terhadap tertib administrasi Pemerintah Desaan Desa dalam dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin di capai.

Selanjutnya, ada 12 orang atau 56,1% yang jawaban dikategori penilaiannya kurang berperan, artinya Camat kurang berperan dalam memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam menyediakan penyusunan peraturan, memfasilitasi dan menetapkan peraturan desa serta dalam memfasilitasi sarana dan prasana tertib administrasi Pemerintah Desaan Desa.

Tabel III.1 : Jawaban Responden tentang Pemberian Pedoman Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		Berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Menyediakan Penyusunan Peraturan Desa	3	13,6	8	36,4	11	50,0	22	100
2	Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa	3	13,6	7	31,8	12	54,5	22	100
3	Memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4	18,2	4	18,2	14	63,6	22	100
	Jumlah	10	15,2	19	28,8	37	56,1	66	300
	Rata-rata	3	15,2	6	28,8	12	56,1	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Kemudian sebanyak 6 orang atau 28,8% dari jawaban responden penelitian dikategori penilaian cukup berperan, hasil data yang diperoleh dari responden penelitian sebagian mereka mengatakan pemberian pedoman cukup berperan oleh pemerintah kecamatan karena saat memberikan pedoman terhadap Tertib Administrasi Pemerintahan Desa pemerintah kecamatan menyediakan penyusunan peraturan desa, memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa serta memfasilitasi sarana dan prasarana tertib administrasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian data penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pembinaan camat terhadap kepala desa pada indikator melakukan pemberian pedoman kepada Pemerintahan Desa yaitu pemberian acuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintahan Desa khususnya dalam penelitian ini kepala desa dan perangkat desa. Sebagian item yang dinilai dapat digolongkan ke dalam kategori kurang berperan.

## b. Pemberian Bimbingan

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang peranan Camat dalam memberikan bimbingan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, berikut dipaparkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III.2 : Jawaban Responden tentang Pemberian Bimbingan kepada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		Berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		f	%	f	%	f	%	F	%
1	Kegiatan diikuti oleh semua Pemerintahan Desa	3	13,6	7	31,8	12	54,5	22	100
2	Pemerintahan Desa dapat menerima dengan baik dan dapat mengerti apa yang disampaikan	4	18,2	7	31,8	11	50,0	22	100
3	Adanya diskusi dan tanya jawab	13	59,1	0	0,0	9	40,9	22	100
	Jumlah	20	90,9	14	63,6	32	145,5	66	300
	Rata-rata	7	30,3	5	21,2	11	48,5	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel di atas dilihat indikator pemberian bimbingan oleh camat Bandar Petalangan terhadap Pemerintahan Desa, ternyata ada 7 orang atau 30,3% yang jawaban dikategori penilaiannya berperan, artinya Camat dalam memberikan bimbingan terhadap sub indikator yang diikuti oleh semua Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan dan adanya diskusi tanya jawab. dalam hal ini untuk mengikuti seluruh kegiatan bimbingan memang diikuti oleh semua Pemerintahan Desa karena bimbingan tersebut dinilai sangat penting demi terlaksananya bimbingan kearah yang lebih baik. Adapun bimbingan tersebut adalah dengan memberikan kepada Pemerintahan Desa tentang arti penting pelaksanaan tugas, fungsi dan

kewajiban yang diemban oleh Pemerintahan Desa.

Kemudian sebanyak 5 orang atau 21,1% dari jawaban responden penelitian mengenai pemberian bimbingan kepada Pemerintahan Desa khususnya kepala desa dan perangkat desa mengatakan cukup berperan, hasil data yang diperoleh dari responden penelitian sebagian mengatakan hanya kadang-kadang dalam pemberian bimbingan kepada Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, sehingga responden tidak mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, juga kurang memahami hasil diskusi atau tanya jawab tersebut.

Sebanyak 11 orang atau 48,5% dari jawaban responden penelitian mengenai pemberian bimbingan kepada Pemerintahan Desa khususnya kepala desa dan perangkat desa mengatakan kurang berperan, hasil data yang diperoleh dari responden penelitian sebagian mengatakan jarang dalam pemberian bimbingan kepada Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan, sehingga responden tidak mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, juga tidak memahami hasil diskusi atau tanya jawab tersebut.

Berdasarkan analisis dan uraian data penelitian maka dalam indikator memberikan bimbingan dalam kegiatan yang dilakukan diikuti oleh semua kepala desa dan diberikan secara berkala, peserta kegiatan kurang menerima dengan baik dan kurang mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dan hanya diskusi atau tanya jawab antara yang pembimbing dengan yang dibimbing,

Camat kepada Pemerintahan Desa dinilai dalam kategori kurang berperan.

### c. Pemberian Arahan

Camat juga melakukan pembinaan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

Pemberiaan arahan terhadap kepala dan perangkat desa/Pemerintahan Desa merupakan mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dan Camat juga memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang peranan Camat dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam memberikan arahan, berikut gambaran umumnya pada tabel berikut:

Tabel III.3 : Jawaban Responden tentang Peranan Camat Dalam Pemberian Arahan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		Berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		F	%	f	%	f	%	F	%
1	Meningkatkan tanggungjawab terhadap masalah yang timbul	2	9,1	7	31,8	13	59,1	22	100
2	Memberikan pengarahan mengenai tugas Pemerintahan Desa	1	4,5	4	18,2	17	77,3	22	100
	Jumlah	3	6,8	11	25,0	30	68,2	44	200
	Rata-rata	2	6,8	6	25,0	15	68,2	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel di atas dilihat indikator Camat memberikan pengarahan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, ternyata hanya 2 orang atau 6,8% yang jawabannya dikategorikan berperan, artinya Camat dalam memberikan pengarahan terhadap Pemerintahan Desa dapat diterima dan di mengerti artinya Pemerintahan Desa mengerti dan memahami isi dari pengarahan yang diberikan.

Kemudian sebanyak 6 orang atau 25,0% dari jawaban responden penelitian mengenai memberikan pengarahan terhadap perangkat desa dikategori penilaian cukup berperan, berdasarkan data yang diperoleh dari responden penelitian sebagian mengatakan dalam memberikan pengarahan Camat hanya kadang-kadang dalam memberikan pengarahan kepada Pemerintahan Desa, sehingga Pemerintahan Desa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah yang timbul dan belum maksimalnya pengarahan yang diberikan camat mengenai tugas pemerintah.

Ada 15 orang atau 68,2% jawaban responden penelitian yang mengkategorikan penilaian peranan Camat dalam memberikan pengarahan terhadap Pemerintahan Desa kurang berperan, karena Pemerintahan Desa belum maksimal menjalankan tugasnya dan tidak pernah mendapat pengarahan serta tidak memahami dan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemerintahan Desa.

Berdasarkan analisis dan uraian data penelitian maka dalam indikator pengarahan Camat kepada perangkat desa dinilai dalam kategori penilaian kurang berperan.

#### d. Pemberian Pelatihan

Dalam Pemerintahan Desa sendiri dapat terciptanya Pemerintahan Desa yang profesional, mandiri, tanggung jawab dan adanya kualitas yang lebih baik jika itu semua dilakukan dengan sungguh sungguh berdasarkan efektif dan efisien dan mampu merespon atupun cepat tanggap memanfaatkan peluang yang ada dan memahami keinginan dari masyarakat. Untuk mengetahui tanggapan respoden penelitian tentang peranan Camat dalam memberi pelatihan terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, berikut gambaran umumnya pada tabel berikut:

Tabel III.4: Jawaban Responden tentang Peranan Camat Dalam Memberikan Pelatihan Kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		Berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Membuat Program Pelatihan	1	4,5	4	18,2	17	77,3	22	100
2	Melaksanakan Program yang telah dibuat	5	22,7	7	31,8	10	45,5	22	100
	Jumlah	6	13,6	11	25,0	27	61,4	44	200
	Rata-rata	3	13,6	6	25,0	14	61,4	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel di atas dilihat indikator Camat memberikan pelatihan kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, ternyata hanya 3 orang atau 13,6% yang jawabannya dikategorikan berperan, artinya responden memahami pelatihan yang diberikan camat terhadap program yang telah rencanakan dan program yang telah dilaksanakan, dan ini akan ditingkatkan kedepannya.

Kemudian sebanyak 6 orang atau 25,0% dari jawaban responden penelitian mengenai pemberian pedoman terhadap Pemerintahan Desa dikategorikan penilaian kurang berperan, berdasarkan data yang diperoleh dari responden penelitian sebagian mengatakan dalam memberikan pelatihan kepada pemerintah desa dan Perangkat desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan selalu ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan sehingga Pemerintahan Desa kurang paham dapat pembuatan program dan yang pelaksanaan program yang direncanakan.

Ada 14 orang atau 61,4% jawaban responden penelitian yang mengkategorikan penilaian peranan

Camat dalam memberikan pelatihan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan kurang berperan, artinya Pemerintahan Desa tidak memahami dan mengetahui dalam pembuatan program dan melaksanakan program yang telah direncanakan.

Berdasarkan analisis dan uraian data penelitian maka dalam indikator memberikan pelatihan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan dinilai dalam kategori penilaian kurang berperan.

#### e. Pemberian Supervisi

Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian tentang peranan Camat dalam memberikan supervisi kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan kepada Pemerintahan Desa, berikut gambaran umumnya pada tabel III.5.

Tabel III.5: Jawaban Responden tentang Peranan Camat Dalam Pemberian Supervisi kepada Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		F	%	f	%	f	%	f	%
1	Melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3	13,6	7	31,8	12	54,5	22	100,0
2	Mengadakan tindakan perbaikan	4	18,2	11	50,0	7	31,8	22	100,0
	Jumlah	7	15,9	18	40,9	19	43,2	44	200
	Rata-rata	4	15,9	9	40,9	10	43,2	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel III.5 dilihat indikator Camat dalam pemberian supervisi kepada Pemerintahan Desa kecamatan melakukan di tingkat Kecamatan Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan, ternyata 4 orang atau 15,9% yang jawabannya dikategorikan berperan, artinya responden memahami Camat dalam memberikan supervisi kepada Pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan.

Kemudian sebanyak 9 orang atau 40,9% dari jawaban responden penelitian mengenai pemberian supervisi kepada pemerintah dikategori penilaian cukup berperan, artinya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa jarang sekali di evaluasi oleh pemerintah kecamatan yang mengakibatkan Pemerintahan Desa lamban dalam melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya sebagai Pemerintahan Desa, dan tidak adanya tindakan perbaikan pada setiap kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, itu disebabkan kurang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Ada 10 orang atau 43,2% jawaban responden penelitian yang mengkategorikan penilaian peranan Camat dalam pemberian supervisi kepada Pemerintahan Desa kurang berperan, artinya Pemerintahan Desa tidak mengetahui apakah Camat pernah melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap tertib Administrasi Pemerintahan Desa. Selain itu tidak adanya penyelesaian/perbaikan terhadap masalah yang ada dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan.

Berdasarkan analisis dan uraian data penelitian maka dalam indikator pemberian supervisi kepada Pemerintahan Desa dinilai dalam kategori penilaian cukup berperan.

Penilaian responden pada tabel di atas mengenai peranan Camat dalam membina tertib administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terhadap tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, Pemberian bimbingan, Pemberian Arahan, pemberian Pelatihan dan Pemberian supervisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6 :Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014

No.	Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah	
		Berperan		Cukup berperan		Kurang berperan			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Pemberian Pedoman	3	13,6	6	27,3	12	54,5	22	100
2	Pemberian Bimbingan	7	31,8	5	22,7	11	50,0	22	100
3	Pemberian Arahan	2	9,1	6	27,3	15	68,2	22	100
4	Pemberian Pelatihan	3	13,6	6	27,3	14	63,6	22	100
5	Pemberian Supervisi	4	18,2	9	40,9	10	45,5	22	100
	Jumlah	19	17,3	32	29,1	62	56,4	110	500
	Rata-rata	4	17,3	6	29,1	12	56,4	22	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan rekapitulasi seluruh penilaian dari melalui melakukan pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan, pemberian pelatihan dan pemberian supervisi terhadap tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam kategori kurang berperan, hal ini dapat dijelaskan dari 22 orang yang dijadikan responden penelitian, persentase yang tertinggi terdapat pada kolom atau kategori penilaian kurang berperan yaitu 12 orang atau 56,4%, kemudian pada kategori cukup berperan sebanyak 6 orang atau 29,1%, dan yang terkecil jawaban responden yaitu pada kategori penilaian kurang berperan sebanyak 4 orang atau 17,3%. Jadi dapat dijelaskan bahwa peranan Camat dalam membina kepala Desa di Kecamatan Bandar

Petalangan Kabupaten Pelalawan secara keseluruhan adalah termasuk kategori kurang berperan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa.

## **2. Hambatan Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014**

### **1. Kurangnya perencanaan dan pengalaman**

Dalam hal membina tertib administrasi Pemerintah Desa tidak memiliki jadwal yang rutin yang tetap setiap bulan, sehingga dalam memberikan pembinaan yang dilaksanakan di ruang serba guna Kecamatan tidak memadai untuk menampung seluruh Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan sehingga Pemerintahan Desa yang tidak hadir tersebut tidak mendapat informasi sehingga kurang paham dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai Pemerintahan Desa sesuai aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kecamatan.

### **2. Rendahnya Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa**

Selain itu yang menjadi hambatan camat terhadap Pemerintahan Desa dikecamatan Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan yaitu rendahnya pendidikan dan pemikiran Pemerintahan Desa dalam mengelola dan mengurus desanya sehingga sulit untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada saat sekarang ini pengelolaan dan pengurusan desanya, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka banyak yang terbengkalai.

### **3. Kurangnya Kesadaran Aparat Pemerintahan Kecamatan**

Sebagai seorang pembina tertib administrasi Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Desa, pemerintah kecamatan kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina tertib administrasi Pemerintah Desa, sehingga pembinaan yang mereka lakukan belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tertib administrasi Pemerintah Desa.

### **4. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa seperti lemari arsip serta ruang untuk penyimpanan barang administrasi desa dan barang inventaris desa.

## **E. KESIMPULAN**

1. Peran Camat dalam pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014, dalam pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan, pemberian pelatihan dan supervisi telah dilaksanakan oleh Camat yang dibantu oleh Kasi Pemerintahan, hanya saja pembinaan tersebut

kurang berperan karena masih ada Pemerintahan Desa dan perangkat desa yang belum paham dan mengerti tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, dan dalam memberikan pengarahannya Camat tidak mengumpulkan seluruh Pemerintahan Desa, sehingga sebahagian Pemerintahan Desa tidak mengerti dan paham akan tugasnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dalam tugasnya.

2. Hambatan Camat terhadap pemerintah desa dikecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yaitu : (a) Kurangnya perencanaan dan pengalaman. (b) Rendahnya Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa. (c) Kurangnya Kesadaran Aparat Pemerintahan Kecamatan. Sebagai seorang pembina tertib administrasi Pemerintah Desa kepada Pemerintahan Desa, pemerintah kecamatan kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina tertib administrasi Pemerintahan Desa, sehingga pembinaan yang mereka lakukan belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tertib administrasi Pemerintahan Desa. (d) Kurangnya Sarana dan Prasarana.

## **F. SARAN**

1. Sebaiknya pihak kecamatan memperhatikan Sumber Daya Manusia terhadap Perangkat Desa di lingkungan kecamatan Bandar Petalangan dengan

mengkoordinasikan hal tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti. Selalu memberikan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan administrasi pemerintah desa sehingga pelaksanaan tertib administrasi Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat.

2. Sebaiknya pihak kecamatan mampu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam hal melengkapi sarana dan prasarana untuk lebih mempermudah Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Administrasi Pemerintah desa se-Lingkungan Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk di perbaiki demi mempermudah akses mobilitas kegiatan dari semua aspek yang mendukung tertib administrasi Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan maupun dalam regional kecamatan.
4. Camat hendaknya memberikan materi pembinaan secara sederhana dan menarik kepada pemerintah desa yang mengikuti pembinaan tugas pemerintah desa, sehingga diharapkan semua kepala desa dan perangkat desa dapat mengerti dan mampu untuk menerapkannya dalam tertib administrasi Pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa. 2010. *Civic Education, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta
- Syadam, Gauzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Thoha, Miftah, 2003. *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya, A.W, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Tertib administrasi Pemerintah Desaan Daerah